

RESEARCH ARTICLE

Determinan Opini Audit Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Muamar Wiralaksana^{1*}, Rita Martini², Maria³^{1,2,3} Program studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jln. Jl Sriwijaya Negara
Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia.Corresponding Email: wiralaksanamuamarwira@gmail.com^{1*}**Histori Artikel:**

Dikirim 21 Oktober 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 November 2025; Diterima 15 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Wiralaksana, M., Martini, R., & Maria, M. (2026). Determinan Opini Audit Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 362-375. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5753>.

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan Good Governance. Salah satu instrument penting dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan adalah audit laporan keuangan oleh BPK, khususnya opini audit yang dijadikan indikator kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Opini audit mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Namun, beberapa daerah masih mengalami fluktiasi opini audit dari tahun ke tahun. Kajian bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah berdampak pada pendapat audit. Studi ini melibatkan 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan selama periode 2018–2022. Saturasi sampel digunakan untuk penentuan sampel, dan total sampelnya adalah 155. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara agen dan direktur. Regresi logistik dipakai dalam penganalisaan data. Hasil analisisnya mengungkapkan bahwa hasil audit berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit. Semakin banyak temuan, semakin rendah kualitas laporan keuangan dan berpotensi menurunkan opini audit. Namun, opini audit tidak ditentukan oleh tindak lanjut hasil pemeriksaan, pendapatan asli daerah, atau belanja daerah. Tindak lanjut pemeriksaan tidak berpengaruh, namun menunjukkan arah yang positif, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan tindak lanjut tetap penting dilakukan meskipun tidak secara langsung mempengaruhi opini. Sementara itu, pendapatan asli daerah dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah pengaruh negatif, yang mengindikasikan peningkatan terhadap pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah tidak menjamin perbaikan terhadap opini audit. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti temuan audit atas pendapatan asli daerah dan belanja daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan. Penelitian juga berdampak penting dalam menjelaskan kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Temuan Audit; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Daerah; Opini Audit.

Abstract

Transparent and accountable regional financial management is a key focus in implementing good governance. A crucial instrument in providing financial management is the audit of financial statements by the Supreme Audit Agency (BPK), specifically the audit opinion, which is used as an indicator of the quality of regional government financial governance. The audit opinion reflects compliance with government accounting standards. However, some regions still experience fluctuations in audit opinions from year to year. The goal of the study is to determine how auditing works, how long it takes to complete an audit, how much land is available, and how much land is worth. This study covered 17 districts and cities in Sumatera Selatan between 2018 and 2022. Saturasi sampel is used for sampling, and the total number of samples is 155. Agency theory is used to explain the relationship between agents and directors. Logistic regression is used in data analysis. The analysis revealed that audit findings significantly negatively impacted the audit opinion. The greater the number of findings, the lower the quality of the financial statements and the potential for a lower audit opinion. However, the audit opinion was not determined by follow-up on audit findings, local revenue, or regional expenditure. Audit follow-up had no effect, but showed a positive trend, indicating that follow-up remains important even though it does not directly affect the audit opinion. Meanwhile, local revenue and regional expenditure had no significant effect and showed a negative trend, indicating that improvements in revenue and expenditure management do not guarantee an improvement in the audit opinion. The research's implications indicate that to increase public trust in financial management, local governments need to follow up on audit findings on local revenue and spending as a form of accountability to the public for any indications of state financial losses. The research also has a significant impact on explaining local governments' performance in managing their finances.

Keyword: Audit Findings; Follow-Up of Examination Results; Locally-Generated Revenue; Regional Expenditure; Audit Opinions.

RESEARCH ARTICLE

1. Pendahuluan

Opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang optimal. Transparansi membuka ruang bagi publik dan pihak-pihak berkepentingan untuk mengevaluasi bagaimana dana publik digunakan. Disisi lain, akuntabilitas menjamin bahwa semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan finansial negara dapat dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab yang melekat pada setiap entitas sektor publik tercermin melalui proses pembuatan dan pelaporan data keuangan kepada masyarakat atau para investor. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja daerah. Dalam aspek pengelolaan keuangan, opini audit digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Audit laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit dari BPK menjadi indikator penting yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan prinsip tata kelola yang baik, serta meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2022 dan 2023, masih terdapat beberapa pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara sebagian besar daerah lain telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa sebagian daerah belum berhasil mencapai opini WTP. Lebih lanjut, hasil analisis BPK menunjukkan bahwa opini audit yang belum optimal tersebut seringkali berkaitan dengan tingginya jumlah temuan audit (misalnya, ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kelemahan sistem pengendalian), tingkat tindak lanjut yang belum maksimal atas rekomendasi BPK, pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak dikelola secara optimal, serta belanja daerah yang tidak efisien atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan, serta keterlambatan pelaporan audit yang mencerminkan ketidakfisian dalam pelaksanaan audit. Opini audit mencerminkan sejauh mana laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pencapaian opini audit tidak hanya mencerminkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menjadi salah satu ukuran dalam keberhasilan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta memiliki fungsi sebagai mekanisme pemantauan dan pengendalian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan cara untuk mengetahui apakah laporan keuangan suatu daerah memenuhi standar kualitas. Laporan keuangan yang baik menunjukkan tanggung jawab pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan administratif dan standar akuntansi. Teori agency telah digunakan dalam menganalisis determinan opini audit (Salsabila & Wahyudi, 2022), (Setyaningrum & Haryanto, 2024), (Yusuf & Gustina, 2022). Teori Agency menjelaskan mengenai hubungan yang berkaitan dengan kontrak antara principal, yaitu DPRD sebagai perwakilan rakyat dengan agent selaku pemerintah daerah. Pertentangan dapat terjadi saat *agent* tidak melaksanakan perintah *principal*. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diarahkan oleh DPRD selaku wakil rakyat, sehingga dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Namun pemerintah daerah sebagai pihak agen dapat memiliki pemikiran untuk tidak melaksanakannya, sehingga akan munculnya berbagai macam praktik penyimpangan. Hal ini membuat peran auditor diperlukan dalam memfasilitasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang berfungsi sebagai pihak yang menjalankan pemeriksaan serta pengamatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

RESEARCH ARTICLE

2. Tinjauan Pustaka

Kajian sebelumnya telah mengukur opini audit menggunakan karakteristik pemerintah daerah (Fitriana dkk, 2025), (Rumihin dkk, 2021). Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan jumlah total masing-masing variabelnya. Namun, penelitian sebelumnya belum menguji hubungan keempat variabel secara simultan dan masih sedikit penelitian yang menggabungkan konteks audit dengan ukuran pemerintah daerah. Kesenjangan tersebut menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan dalam memberikan gambaran secara komprehensif bagaimana pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk bisa menghasilkan dan menggunakan anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran dapat digunakan dalam rangka perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu, sebagian besar studi terdahulu menggunakan pendekatan regresi linear yang dimana opini audit bersifat kategorik, sehingga pendekatan regresi logistik seperti yang digunakan dalam penelitian ini dinilai lebih tepat. Studi ini mengukur opini audit menggunakan skala nominal dengan nilai 1 bagi opini wajar tanpa pengecualian, serta 0 bagi opini lainnya dengan menggunakan skala dummy yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan skala likert. Penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan susunan entitas yang diaudit disebut dengan opini auditor (Setyaningrum, 2024). Auditor menyampaikan opini audit sebagai pendapat profesional terkait kelayakan penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian terhadap seluruh aspek material. Proksi untuk opini audit meliputi temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah, serta menggunakan 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini penting dilakukan karena objeknya berupa LKPD yang sudah dilakukan audit, harus dianggap wajar mengacu pada standar akuntansi yang umum, dinilai menggunakan opini audit sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. Keunggulan penelitian ini jika dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu penggunaan kombinasi variabel yang komprehensif yang belum banyak digunakan secara bersama dalam penelitian sebelumnya, dengan menggabungkan unsur karakteristik pemerintah daerah dengan unsur konteks audit yang dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu, penelitian menggunakan analisis regresi logistik. Penelitian ini berfokus pada opini audit sebagai variabel dependen (Y), karena opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator utama kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini menggambarkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, serta pengungkapan dan penyajian informasi keuangan. Opini audit bukan hanya penting bagi kredibilitas pemerintah daerah di mata publik, tetapi juga memengaruhi kepercayaan investor, pemberian insentif fiskal dari pusat, dan penilaian kinerja oleh lembaga eksternal lainnya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi keluarnya opini audit tertentu.

Dalam menjelaskan opini audit sebagai variabel Y, penelitian ini menggunakan empat variabel independen (X), yaitu temuan audit yang mencerminkan kelemahan sistem pengendalian, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh BPK selama proses audit. Dalam kerangka teori agensi, banyaknya temuan menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan oleh agen (pemerintah daerah), yang bisa memicu ketidakpercayaan dari prinsipal (publik). Semakin banyak temuan audit, semakin besar kemungkinan opini audit menjadi negatif. Maka, temuan audit dipilih sebagai variabel utama yang diasumsikan memiliki pengaruh kuat terhadap opini audit. Tindak lanjut atas temuan audit yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kesalahan yang telah ditemukan. Tingkat kepatuhan terhadap tindak lanjut juga menjadi indikator tata kelola keuangan yang baik. Dalam perspektif teori agensi, ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan yang dapat dilihat dari seberapa besar persentase tindak lanjut dalam menyikapi temuan yang dapat mempengaruhi penilaian opini. Pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah daerah secara mandiri tanpa tergantung pada dana transfer pusat. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang tinggi diharapkan memiliki sumber daya yang memadai untuk membangun sistem keuangan yang baik, menyusun laporan keuangan yang transparan, dan mematuhi standar pelaporan, serta dapat menggunakanannya untuk

RESEARCH ARTICLE

menindaklanjuti temuan audit atas pendapatan asli daerah. Namun demikian, literatur terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap opini audit. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali hubungan tersebut dalam konteks daerah di Sumatera Selatan. Belanja daerah mencerminkan prioritas dan kapasitas pemerintah dalam menggunakan anggaran. Besarnya belanja juga dapat mencerminkan kompleksitas pelaporan yang dapat berujung pada kesalahan pencatatan yang berujung pada materialitas dan dapat mempengaruhi opini audit. Oleh karena itu, dalam konteks audit, penting untuk menguji apakah belanja daerah berdampak terhadap kualitas laporan keuangan dan opini audit yang dihasilkan. Perolehan dari proses pemeriksaan oleh BPK, temuan audit mencakup persoalan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal (Rahmi & Ariani, 2021); (Syam, dkk, 2022). Temuan audit mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam teori agensi, semakin banyak temuan audit, semakin tinggi risiko ketidakpatuhan agent (pemerintah daerah) terhadap prinsip tata kelola yang baik, yang dapat mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Salsabila & Wahyudi (2022); Rahmi & Ariani (2021); Indriani dkk, (2024) menemukan bahwa temuan audit tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sebaliknya, Nugroho dkk, (2023); Ningsih & Binastuti (2021) menunjukkan bahwa temuan audit berdampak besar pada opini audit. Temuan audit berpengaruh terhadap opini audit, namun negatif karena semakin banyak temuan, semakin rendah kualitas laporan keuangan dan berpotensi menurunkan opini audit yang diberikan. H₁: Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap Pendapat Audit. Sebagai bagian dari sekumpulan proedur pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil audit menempati posisi krusial dalam menentukan keberhasilan pengawasan. Tahapan ini mencerminkan komitmen entitas dalam merespons rekomendasi auditor secara tepat dan bertanggung jawab. Tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki temuan audit. Menurut Mutiara dkk, (2022) tindak lanjut atas rekomendasi tidak berdampak atau negatif bagi opini atas laporan keuangan. Namun (Salsabila & Wahyudi, 2022); (Rahmi & Ariani, 2021); Indriani, dkk (2024) dan Ningsih & Binastuti (2021) menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan memengaruhi opini audit secara positif. Tindak lanjut atas hasil temuan audit adalah indikator penting dalam perbaikan tata kelola keuangan. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah memengaruhi jenis opini audit yang diberikan terhadap LKPD. Tingginya tingkat tindak lanjut yang dilaksanakan, semakin baik pula pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan kualitas opini audit di periode selanjutnya (Setyaningrum, 2015). H₂ : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit.

PAD ialah pemasukan dengan sumber dari kekuatan ekonomi lokal dan pelaksanaannya mengacu pada regulasi yang diatur dalam undang-undang. PAD mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Dalam teori agensi, PAD yang tinggi dapat meningkatkan independensi dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dapat mempengaruhi opini audit. Penelitian Rumihin dkk, (2021); Maula & Wibowo (2022); Sari & Darmastuti (2023) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh negatif bagi opini audit. Sebaliknya, Apriani dkk, (2024) dan Rosadi & Okfitasari (2019) menunjukkan PAD pengaruh positif bagi opini audit. PAD menjadi indikator dalam mengukur kekayaan pemerintah daerah, karena keseluruhan pendapatan daerah menunjukkan seberapa besar potensi ekonomi yang dimiliki. Besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah memungkinkan pelaksanaan pelayanan publik secara optimal. Kewajiban pemerintah adalah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengungkapan PAD dihadapan publik. Dengan demikian, peluang terjadinya kecurangan yang dapat berpengaruh pada penilaian opini yang diterima menjadi lebih rendah. H₃ : PAD berpengaruh negatif terhadap opini audit. Pengeluaran yang berasal dari kas umum daerah dan menyebabkan penurunan ekuitas dana lancar guna merealisasikan pengelolaan pemerintahan yang disebut sebagai belanja daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006. Pemerintah daerah yang melakukan pengeluaran belanja dalam jumlah besar memiliki risiko lebih tinggi dalam hal pencatatan. Semakin besar belanja daerah, semakin kompleks pula kegiatan pemerintahan yang dijalankan, sehingga memerlukan sistem pengendalian yang memadai. Anggaran belanja yang besar membutuhkan pengendalian yang memadai,

RESEARCH ARTICLE

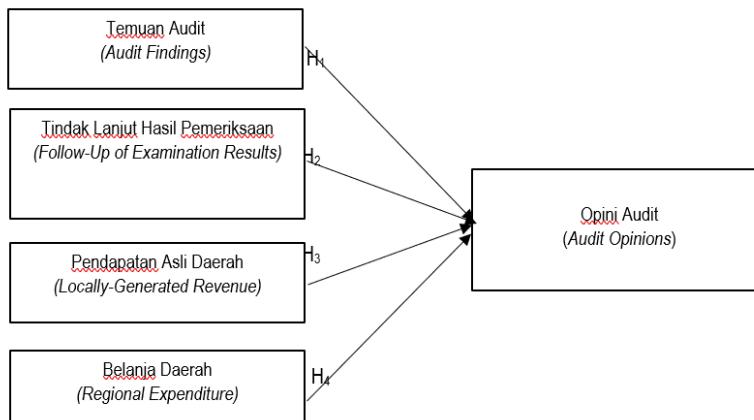
sehingga jika dalam pengelolaannya tidak dilakukan secara cermat, akibatnya kemungkinan besar akan timbul penyimpangan yang memengaruhi penilaian auditor dalam pemberian opini atas laporan keuangan. Belanja daerah mencerminkan prioritas dan kapasitas pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran. Belanja yang tinggi belum tentu efisien dan akuntabel jika tidak dilakukan pengelolaan secara baik. Dalam konteks audit, apabila belanja yang dilakukan tidak sesuai dengan peruntukannya maka akan mempengaruhi opini audit. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dapat menyebabkan SiLPA yang mengindikasikan adanya ketidakefisienan. Maula & Wibowo (2022); Fitriana dkk, (2025); Sutaryo dkk, (2020); Rosadi & Okfitasari (2019) menunjukkan pengaruh negatif belanja daerah terhadap opini audit. Sebaliknya, Rumihin dkk, (2021), menunjukkan bahwa belanja daerah memengaruhi opini audit secara positif. H_4 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap opini audit.

3. Metode Penelitian

Populasi yang diteliti terdiri dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Data sekunder yang digunakan meliputi laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018-2022. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *saturated sampling*, dengan fokus pada seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang mendapatkan pendapat wajar dengan pengecualian, serta yang memiliki jumlah temuan audit tertinggi dari BPK. Berlandaskan ketentuan dalam UU. No 15 Tahun 2004, pendapat profesional auditor, yang dikenal sebagai opini, diberikan untuk menilai apakah informasi keuangan dalam laporan disajikan secara wajar. BPK menggunakan empat kriteria pokok dalam proses pemeriksaan sebagai dasar penilaian, yaitu kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan undang-undang, serta efektivitas SPI. Variabel opini audit diukur menggunakan skala *dummy*. Variabel *dummy* digunakan guna meningkatkan keakuratan hasil analisis serta memperkuat kualitas data yang dihasilkan (Sousa, 2014). Untuk merepresentasikan variabel kualitatif dalam bentuk numerik digunakan variabel *dummy*, yakni disandikan dengan angka 0 dan 1.

Tabel 1. Skala Dummy

Skala Dummy	Deskripsi
0	Opini Wajar Dengan Pengecualian
	Opini Tidak Wajar
1	Opini Tidak Menyatakan Pendapat
	Opini Wajar Tanpa Pengecualian
	Opini Wajar Dengan Hal yang Perlu Ditekankan



Gambar 1. Model Penelitian

RESEARCH ARTICLE

Variabel independen terdiri dari temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, PAD, dan belanja daerah. Sebagai perolehan dari proses pemeriksaan oleh BPK, temuan audit mencakup persoalan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Dalam memberikan opini, auditor juga mendasarkan penilaian pada kepatuhan entitas terhadap ketentuan hukum, tertuang di pasal 16 UU RI Nomor 15 Tahun 2004. Temuan audit diukur berdasarkan total jumlah (kuantitatif) temuan berdasarkan 2 indikator, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan kelemahan SPI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang diterbitkan oleh BPK. Temuan audit dihitung menggunakan rumus sebagai berikut berdasarkan acuan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017.

$$\text{Total Temuan} = \text{Jumlah Temuan Ketidakpatuhan} + \text{Jumlah Temuan SPI} \dots\dots\dots (1)$$

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan upaya pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan rekomendasi yang diberikan BPK untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah dalam memperbaiki berbagai kelemahan terhadap sistem keuangan dan juga pengadaan terhadap barang dan jasa, sehingga temuan audit tidak berulang pada periode mendatang. Tindak lanjut atas hasil audit menempati posisi krusial dalam menentukan keberhasilan pengawasan. Tahapan ini mencerminkan komitmen entitas dalam merespons rekomendasi auditor secara tepat dan bertanggungjawab. BPK memiliki otoritas untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut, dan bila tidak terdapat respons yang memadai dari entitas terkait, maka BPK dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Tindak lanjut hasil pemeriksaan didapat pada LHP dan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, sebagaimana tercantum dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 dan tertera dalam pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

$$\frac{\text{Tindak lanjut hasil pemeriksaan}}{\text{nilai sesuai rekomendasi}} * 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Pendapatan asli daerah dan belanja daerah diukur berdasarkan total PAD dan total belanja yang didapatkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pendapatan asli daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam membayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Kinerja keuangan yang solid turut berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun kinerja tidak secara langsung memengaruhi tingkat kewajaran laporan keuangan, sebab kinerja lebih befungsi sebagai indikator utama kondisi keuangan suatu pemerintah daerah. Belanja daerah tidak dapat mempengaruhi penilaian atas opini audit. Opini audit tidak bergantung pada besar kecilnya anggaran belanja suatu daerah, melainkan bagaimana daerah tersebut dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Sebagai entitas non profit, pemerintah tidak diharuskan untuk meraih keuntungan, namun hal itu tidak berarti bahwa pengeluaran bisa dilakukan sembarangan. Karena belanja merupakan titik rawan dalam pengelolaan anggaran, auditor pemerintah memberikan perhatian khusus pada pos ini. Ketidakpatuhan aparatur negara terhadap proses belanja menjadi salah satu pemicu terjadinya KKN. Untuk itu, setiap tahap pengadaan barang dan jasa wajib dijalankan lewat pemahaman yang memadai, disertai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pendapatan asli daerah dan belanja daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagri No. 77 tahun 2010 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Jumlah total pendapatan asli daerah} \dots\dots\dots (3)$$

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Jumlah total belanja daerah} \dots\dots\dots (4)$$

Sampel penelitian terdiri dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan, dengan total 155 observasi. Penelitian difokuskan di Sumatera Selatan karena daerah ini menunjukkan fenomena inkonsistensi opini audit, khususnya dalam hal capaian opini wajar dengan pengecualian yang masih terjadi di beberapa kabupaten/kota, dimana mayoritas daerah lainnya telah mencapai opini wajar tanpa pengecualian secara konsisten. Opini wajar dengan pengecualian merupakan tanda bahwa laporan keuangan entitas belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, meskipun tidak sepenuhnya tidak wajar. Kemunculan opini ini biasanya berkaitan dengan banyaknya temuan audit, rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut, serta masalah dalam pengelolaan PAD dan belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang layak diteliti secara mendalam untuk menemukan faktor-faktor yang paling memengaruhi kualitas laporan keuangan. Penentuan sampel didasarkan pada kabupaten/kota yang memperoleh opini WDP dan daerah yang memiliki jumlah temuan audit tertinggi. Data diperoleh dari unduhan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018-2022 dan laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan daerah periode 2019-2023 dari situs web BPK. Data dianalisis menggunakan regresi logistik dengan persamaan model:

Keterangan:

- | | |
|------------|---|
| OA | = Opini Audit |
| a | = Konstanta |
| β_1 | = Koefisien Regresi Temuan Audit |
| TA | = Temuan Audit |
| β_2 | = Koefisien Regresi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan |
| TLHP | = Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan |
| β_3 | = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah |
| PAD | = Pendapatan Asli Daerah |
| β_4 | = Koefisien Regresi Belanja Daerah |
| BD | = Belanja Daerah |
| ϵ | = Error |

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Hasil uji memberikan gambaran terhadap data penelitian. Untuk memahami profil data penelitian secara umum, digunakan analisis statistik deskriptif yang meliputi penyajian nilai mean, standard deviasi, serta rentang minimum hingga maximum pada tiap variabel. Rata-rata jumlah temuan audit sebesar 12.85 dengan variasi standar 5.50 yang menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir daerah Sumatera Selatan mempunyai jumlah temuan yang cukup signifikan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti sebesar 72.49% yang berarti sebagian besar rekomendasi audit telah direspon dan ditindaklanjuti. Mean dari Pendapatan asli daerah sebesar 11.09 dengan standar deviasi 0.36 yang menandakan adanya perbedaan kapasitas ekonomi antar daerah dalam sampel, dari 10.44 sampai 12.14. Belanja daerah dengan mean 28.01, nilai maximum sebesar 29.01 yang mengindikasikan beberapa daerah memiliki kapasitas belanja yang jauh lebih besar. Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan opini audit yang paling rendah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021-2022, Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020, Kota Pagar Alam tahun 2022 dan Kota Palembang tahun 2022. Sebaliknya opini audit tertinggi diperoleh 12 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Skor opini audit rata-rata adalah 0.92 dengan deviasi standar 0.25.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Number of Observations	Minimum Value	Maximum Value	Mean Value	Value Standard Deviation
TA	85	2.00	29.00	12.85	5.50
TLHP	85	12.00	29.00	72.49	22.42
PAD	85	10.44	12.14	11.09	0.36
BD	85	27.20	29.01	28.01	0.25
OA	85	0.00	1.00	0.92	0.25

Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit dipakai untuk menentukan kesesuaian model regresi terhadap data aktual. Kesesuaian ini ditentukan lewat nilai probabilitas dari statistik chi-square. Bila Prob. chi square lebih tinggi 0.05, maka mengindikasikan bahwa model telah memenuhi kriteria kelayakan. Hasil uji menunjukkan Prob. chi square > nilai signifikan ($0.3889 > 0.05$) yang menunjukkan bahwa model regresi dapat dikatakan layak dan sesuai atau model dikatakan fit.

Tabel 3. Hasil uji Hosmer and Lemeshow's Goodness

Prob. Chi-Square (8)	0.3889
Prob. Chi-Square (10)	0.0000

Koefisien determinasi digunakan sebagai indikator untuk mengukur kontribusi masing-masing variabel terhadap keakuratan model. Apabila nilainya rendah, hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan tiap-tiap variabel tersebut dalam memengaruhi variabel terikat sangat terbatas. McFadden R-Squared digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kontribusi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat pada model logit. Merujuk pada pedoman interpretasi koefisien korelasi dari Sugiyono (2021), nilai sebesar 0.260385 atau setara dengan 26% berada dalam rentang 0.20 – 0.39 mengindikasikan pengaruh yang lemah.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R2)

McFadden R-squared	0.260385	Mean dependent var	0.929412
S.D. dependent var	0.257656	S.E. of regression	0.225004
Akaike info criterion	0.495084	Sum squared resid	4.050159
Schwarz criterion	0.638770	Log likelihood	-16.04109
Hannan-Quinn criter.	0.552879	Deviance	32.08218
Restr. Deviance	43.37684	Restr. log likelihood	-21.68842
LR statistic	11.29466	Avg. log likelihood	-0.188719
Prob(LR statistic)	0.023445		

Temuan audit, hasil pemeriksaan tindak lanjut, PAD, dan belanja daerah mempengaruhi 26,03% opini audit, dengan 73,97% dipengaruhi oleh variabel lain, menurut nilai R-squared. Uji-F dipergunakan untuk menetapkan besarnya pengaruh kombinasi variabel bebas atas variabel terikat dalam model regresi. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi 0,002, jauh di bawah 0,05. Simpulan bahwa opini audit dipengaruhi oleh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, PAD, dan belanja daerah.

Tabel 5. Hasil uji Matriks Klasifikasi

%Correct	95.29
%Incorrect	4.71

RESEARCH ARTICLE

Uji matriks kualifikasi digunakan untuk menilai persentase estimasi yang tepat dan tidak tepat dalam memprediksi variabel independen. Semakin tingginya tingkat persentase kecocokannya, maka semakin tinggi pula akurasi prediksi model regresi logistik. Persentase prediksi yang diperoleh dari uji matriks klasifikasi sebesar 95,29% mencerminkan bahwa model penelitian ini mampu memprediksi dengan ketepatan yang cukup tinggi, mampu mengklasifikasikan observasi objek penelitian dengan benar karena tingkat ketepatan hampir mendekati 100%.

Tabel 6. Hasil Regresi Logistik

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
(Constant)	22,256	38,208	0,582	0,560
X ₁ _TA	-0,235	0,095	-2,467	0,013
X ₂ _TLHP	0,031	0,021	1,450	0,147
X ₃ _PAD	-0,013	2,315	-0,005	0,995
X ₄ _BD	-0,604	2,062	-0,310	0,756

Melalui pendekatan regresi logistik, penelitian mengevaluasi keterkaitan antara variabel guna menguji kebenaran hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut persamaan regresi logistic:

$$OA = 22,25667 - 0,235597TA + 0,031427 - 0,013715 - 0,640417 + \epsilon$$

Hasil uji-T memberikan gambaran lebih lanjut. Temuan audit sebagai variabel independen, memiliki probablity sebesar 0,013 dan nilai statistic menunjukkan -2,467 yang memperlihatkan hubungan negatif terhadap opini audit, sehingga menerima H₁ yang menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap opini audit. Artinya semakin banyak temuan, maka cenderung berpotensi menurunkan kualitas opini audit. Tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan statistic positif dengan probability 0,147, yang menggarisbawahi bahwa tidak adanya pengaruh terhadap opini audit karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga H₂ ditolak. Tindak lanjut hasil pemeriksaan hanya akan mempengaruhi opini audit jika temuan yang ditindaklanjuti berdampak signifikan secara keuangan dan berulang. Beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan mempunyai tingkat penyelesaian rekomendasi yang tinggi atau rendah masih tetap memperoleh opini WDP. Artinya, sebera tinggi rendahnya persentase tingkat penyelesaian rekomendasi yang dilakukan tidak akan merubah status terhadap opini audit. Kondisi ini menjelaskan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan sebagai pertimbangan utama terhadap opini audit. PAD menunjukkan statistic negatif sebesar -0,005 dengan tingkat signifikansi 0,995, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dan menunjukkan arah yang negatif terhadap opini audit, sehingga menolak H₃. Variabel belanja daerah juga menunjukkan nilai negatif dengan tingkat signifikansi 0,756, yang menunjukkan juga bahwa tidak adanya pengaruh belanja daerah, serta menunjukkan arah hubungan yang negatif terhadap opini audit, sehingga menolak H₄. Peningkatan terhadap pengelolaan PAD maupun belanja tidak serta merta mempengaruhi opini audit. PAD dan belanja hanya menunjukkan kinerja pemerintah daerah, dimana opini tidak menilai sesuatu berdasarkan kinerja, namun berdasarkan kesesuaian dengan laporan keuangan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, uji hipotesis pertama mengonfirmasi bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini audit, sehingga hipotesis pertama diterima. Meningkatnya jumlah temuan audit mengindikasikan bahwa kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah mulai dipertanyakan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas informasi dan berpotensi menurunkan opini audit yang diberikan. Hal ini sejalan dengan studi Maula & Wibowo (2022) yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat untuk mendukung proses pencatatan dan pengungkapan bagi pemangku kepentingan. Dalam perspektif teori Agency (Jensen & Meckling, 1976), temuan audit yang tinggi berfungsi sebagai peringatan bagi *agent* (pemerintah daerah) untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki tata kelola keuangan demi meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kepada *principal*. Sementara itu, uji hipotesis kedua

RESEARCH ARTICLE

menunjukkan bahwa opini audit tidak dipengaruhi oleh tindak lanjut hasil pemeriksaan, meskipun menunjukkan arah yang positif. Temuan ini didukung oleh penelitian Mutiara dkk. (2022) serta Syam dkk. (2023), yang menjelaskan bahwa meskipun tindak lanjut merupakan kewajiban pejabat sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 dengan ancaman sanksi pidana dan denda, hal tersebut bukan merupakan pertimbangan utama BPK dalam menentukan opini. Realitas ini tercermin pada Kota Pagar Alam tahun 2022, di mana meskipun tingkat pelaksanaan tindak lanjut mencapai 99,39%, daerah tersebut tetap memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya tindak lanjut tidak serta merta mengubah jenis opini yang diberikan jika tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selanjutnya, uji hipotesis ketiga mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh dan berarah negatif terhadap opini audit, konsisten dengan temuan Rumihin dkk. (2021) serta Maula & Wibowo (2022). Walaupun peningkatan PAD mencerminkan kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik, kinerja keuangan ini tidak secara langsung memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas, pengungkapankekayaan memang menjadi langkah strategis untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun kinerja keuangan lebih berfungsi sebagai indikator kondisi ekonomi daerah daripada tolok ukur kepatuhan terhadap standar akuntansi yang menjadi dasar penilaian opini. Terakhir, uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap opini audit dengan arah negatif, sebagaimana ditemukan oleh Maula & Wibowo (2022). Semakin besar realisasi anggaran belanja, semakin tinggi pula kompleksitas kegiatan dan risiko terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga diperlukan pengendalian yang memadai untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Meskipun belanja merupakan titik rawan yang mendapat perhatian khusus dari auditor, laporan keuangan tetap dapat meraih opini WTP selama informasi keuangan disusun sesuai dengan SAP. Dengan kata lain, penyimpangan atau kesalahan pencatatan dalam pos belanja tidak akan memengaruhi opini audit secara langsung selama tidak bersifat material terhadap kewajaran penyajian laporan secara keseluruhan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan, di mana opini audit sangat bergantung pada kinerja sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan adanya pelanggaran peraturan yang tercermin dalam banyaknya temuan audit cenderung menurunkan kualitas laporan keuangan dan berpotensi memperburuk opini audit yang diterima, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi finansial negara. Di sisi lain, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan sesuai saran BPK ternyata tidak memengaruhi opini audit secara langsung. Meskipun persentase penyelesaian rekomendasi tinggi, hal tersebut tidak menjadi kriteria utama pemberian opini. Begitu pula dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah yang ditemukan tidak berpengaruh terhadap opini audit. PAD lebih berfungsi sebagai indikator keberhasilan kinerja keuangan dan kemandirian fiskal, sementara besarnya nominal belanja daerah tidak menjadi tolok ukur kewajaran selama penyusunan laporan keuangan tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung oleh pengendalian internal yang memadai. Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan nilai koefisien determinasi variabel yang hanya sebesar 26%, sehingga disarankan bagi peneliti mendatang untuk menambahkan variabel lain seperti kompetensi auditor, pengalaman auditor, etika audit, dan *audit delay*. Untuk mempertahankan opini audit yang positif, pemerintah daerah perlu meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang, berkomitmen penuh dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, serta mengoptimalkan kapasitas fiskal melalui pengelolaan PAD dan belanja yang sesuai aturan. Selain itu, pengawasan berkala yang melibatkan peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan serta kepercayaan publik.

RESEARCH ARTICLE

6. Referensi

- Abimanyu, P. R., Martini, R., & Indriasari, D. (2024). Summary of audit judgment from auditor experience, task complexity, professional skepticism, and goal orientation. *International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS)*, 4(2), 47–52. <https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v4i2.314>.
- Alal Maula, M. I., & Wibowo, P. (2022). Meneropong determinan opini LKPD kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Bina Ekonomi*, 26(1), 23–37. <https://doi.org/10.26593/be.v26i1.5341.23-37>.
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif dan penerapannya dalam penelitian. *Education Journal*, 2(2), 1–6.
- Apriani, R., Yulsiati, H., & Aryani Antina, Y. (2024). Ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pemerintahan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* [atau nama jurnal terkait], 5(1).
- Fatimah, D., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1–15.
- Fitriana, L., Apandi, R. N. N., & Widarsono, A. (2025). Pengaruh aspek finansial dan kinerja non finansial terhadap opini audit pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Republik Indonesia. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 427–447. <https://doi.org/10.62335/hh99t112>.
- Fuad, S. (2013). Pengelolaan LKP pada masa pandemik Covid-19. *Journal of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.
- Garsuarani Octavianti Ningsih, & Sugiharti Binastuti. (2021). The effect of audit findings and recommendation follow ups of BPK-RI's evaluation on local government's performance in districts/cities East Java Province. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(4), 1340–1345. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i4.282>.
- Ge, R., & Zhang, J. J. (2017). Regulatory investigations of audit partners and audit quality improvement. *China Journal of Accounting Studies*, 5(3), 275–293. <https://doi.org/10.1080/21697213.2017.1375647>.
- Ghozali, I. (2018). *Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas*. Universitas Diponegoro.
- Harber, M., & Marx, B. (2020). Audit quality and independence concerns in the South African audit industry: Contrasting views. *South African Journal of Accounting Research*, 34(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/10291954.2019.1667646>.
- Harber, M., Duboisée de Ricquebourg, A., & Maroun, W. (2024). Costs and benefits of mandatory audit firm rotation: Initial engagement experience of audit committee chairs and engagement partners. *Accounting Forum*, 48(1), 63–89. <https://doi.org/10.1080/01559982.2022.2130812>.
- Hay, D., & Cordery, C. J. (2021). Evidence about the value of financial statement audit in the public sector. *Public Money and Management*, 41(4), 304–314. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1729532>.

RESEARCH ARTICLE

- Indriani, D., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2024). The impact of audit findings and follow-up actions on audit recommendations on audit opinions of financial statements with APIP capabilities as a moderating variable (A study on provincial/regencies/cities governments in Suluttenggo Region). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 113–124. <https://doi.org/10.58784/cfabr.159>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Dalam *The Corporate Financiers* (Vol. 3, hlm. 305–360). <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>.
- Johnson, L. A. (2006). The effect of audit scope and auditor tenure on resource allocation decisions in local government audit engagements. *Accounting Forum*, 30(2), 105–119. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.01.002>.
- Kartika, A. D., & Yohanes, S. (2013). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas apparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93–111.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 1, Cetakan 12). Rajawali Pers.
- Li, L., Qi, B., Robin, A., & Yang, R. (2022). The effect of enforcement action on audit fees and the audit reporting lag. *Accounting and Business Research*, 52(1), 38–66. <https://doi.org/10.1080/00014788.2020.1808441>.
- Martini, R., Zulkifli, Z., Sulaiman, S., Sari, K. R., Hartati, S., & Pratiwi, T. A. (2023). Impact of the Village Fund Policy on community economic empowerment during the Covid-19 pandemic. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 6(2), 278–284. <https://doi.org/10.29138/jebd.v6i2.2169>.
- Meinarsih, T., Suratman, A., & Hidayati, N. (2020). The effect of application of accrual-based government accounting standards, apparatus quality, public accountability and government internal control systems on quality of financial statements. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(8), 452–460. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20aug142>.
- Mutiara, R., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 33(1), 1–12.
- Nugroho, D., Sasongko, N., & Dwi Bayu Bawono, A. (2023). The influence of audit findings, auditor change, local government size, leverage and SILPA on BPK audit opinions of local governments in Indonesia. *International Journal of Social Health*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i1.20>.
- Pamungkas, B., Ibtida, R., & Avrian, C. (2018). Factors influencing audit opinion of the Indonesian municipal governments' financial statements. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256>.
- Paramita, P. D., et al. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Edisi 3). STIE Widya Gama Lumajang.
- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2021). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

RESEARCH ARTICLE

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(4), 497–505.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.15851>.

- Riadi. (2016). Pengaruh akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman pegawai negeri sipil beserta kelompok masyarakat (pokmas) terhadap kualitas pengelola dana kelurahan di lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.
- Riana Mayasari. (2022). Lemahnya signifikansi sistem pengendalian internal untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 113–122. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.011>.
- Ritonga, I. T., & Suyanto, S. (2022). Impacts of the Covid-19 pandemic on the audit of local government financial statements: Experience from Indonesia. *Public Money and Management*, 42(6), 452–459. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1964770>.
- Robu, I. B., Aevoae, G. M., Mardiros, D. N., & Herghiliogiu, I. V. (2025). Mergers & acquisition decisions in the energy sector based on financial transparency and audit opinions. *Eastern European Economics*, 63(2), 297–333. <https://doi.org/10.1080/00128775.2023.2225484>.
- Rumihin, R., Ahuluhelu, N., & Leiwakabessy, T. F. F. (2021). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap opini audit atas laporan keuangan pada kab/kota di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018. *Journal of Cleaner Production*, 19(11), 1–13.
- Saeedi, A. (2023). A high-dimensional approach to predicting audit opinions. *Applied Economics*, 55(33), 3807–3832. <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2118224>.
- Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh temuan audit, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pada pemerintah daerah di Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 38–45. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.515>.
- Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Sari, D. N., & Darmastuti, D. (2023). Internal control weaknesses: Its relationship with local government characteristics and follow-up on audit results. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(1), 97–105. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss1.art10>.
- Setyaningrum Ismi, L. (2024). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (Studi kasus OPD Kota Palu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–15.
- Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan (Studi pada BPK Perwakilan Provinsi Riau). *Accounting and Management Journal*, 7(1), 95–107.
- Sousa. (2014). Penggunaan variabel dummy untuk meningkatkan nilai determinasi faktor eksternal terukur terhadap durasi. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.24912/jmts.v1i2.2663>.

RESEARCH ARTICLE

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutaryo, Naviantia, I. A., & Muhtar. (2020). Audit opinion on government financial report: Evidence from local governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129–144.
- Syam, J., Azlina, N., & Rasuli, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah dengan tindak lanjut rekomendasi sebagai variabel moderasi. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), 240–262.
- Tsipouridou, M., & Spathis, C. (2014). Audit opinion and earnings management: Evidence from Greece. *Accounting Forum*, 38(1), 38–54. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2013.09.002>.
- Yusuf, M., & Gustiana, N. (2022). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap opini audit pemerintah pusat dengan rekomendasi audit sebagai variabel moderasi. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 56–64. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4147>.
- Zdolšek, D., Jagrič, T., & Kolar, I. (2022). Auditor's going-concern opinion prediction: The case of Slovenia. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 35(1), 106–121. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1888766>.